

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara berkembang merupakan negara yang masih dalam berproses untuk meningkatkan standar hidup dan ekonominya, atau bisa disebut dengan negara yang sedang meningkatkan ekonomi, kualitas hidup, Pendidikan, dan juga pendapatan. Ciri-ciri negara berkembang yaitu tingginya angka kemiskinan , tingginya angka pengangguran, dan rendahnya pendapatan per kapita. Negara berkembang sering menghadapi masalah Pendidikan, infrastruktur, dan pertumbuhan penduduk yang pesat sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Sari & Hasmarini, 2023).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa jauh aktivitas perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dan mensejahterakan masyarakat, maka hal itu membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat menggambarkan bahwa suatu negara atau wilayah mempunyai Pembangunan ekonomi yang baik. Tujuan Pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, menjaga kestabilan harga, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi adalah hal yang penting untuk diperhatikan pada setiap negara berkembang (Johar, 2023).

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki beragam permasalahan yang dialami. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di

dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa sehingga Indonesia berada pada peringkat keempat di dunia dengan jumlah penduduk paling banyak.

Sebagaimana dikemukakan oleh (Putri, 2019). Banyaknya jumlah penduduk dapat menimbulkan sebuah permasalahan salah satunya adalah tingginya tingkat pengangguran. Setiap negara selalu menghadapi masalah pengangguran, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. salah satu masalah makro ekonomi adalah pengangguran, yang dapat menghambat Pembangunan daerah dan dapat menyebabkan masalah sosial lainnya. Di Indonesia, tingkat pengangguran mencapai lebih dari 5% per tahun. Karena tingkat pengangguran di Indonesia dapat meningkatkan kemiskinan, maka tingkat pengangguran harus segera diatasi (Ardian, Syahputra, & Desmawan, 2022).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran terbuka dapat didefinisikan sebagai individu yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan baru atau sedang mempersiapkan diri untuk memulai bisnis baru atau juga dapat didefinisikan sebagai penduduk yang telah menerima pekerjaan tetapi belum memulai bekerja.

Selain itu, pengangguran merupakan sebutan yang diberikan untuk seseorang yang tidak bekerja atau seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat didefinisikan sebagai kondisi seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan menginginkan pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan tersebut (Sukirno, 1994) dalam (Mouren, Lopian, & Tumangkeng, 2022) Sehingga pengukuran angka pengangguran tidak selalu pada seseorang yang

sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, tetapi juga mereka yang secara potensial siap untuk bekerja.

Pengangguran dapat terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk dan banyaknya tenaga kerja baru dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia pada setiap tahunnya. Tingginya tingkat pengangguran berdampak langsung terhadap masalah ekonomi dan sosial. Pengangguran dapat menyebabkan negara kehilangan barang dan jasa yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pengangguran. Secara sosial, pengangguran menyebabkan penderitaan pada seseorang yang menganggur namun harus hidup dengan pendapatan yang tidak memadai. Tingkat perubahan Angkatan kerja yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan banyaknya lowongan pekerjaan dan kemampuan Perusahaan untuk merekrut tenaga kerja, sehingga hal ini bisa menimbulkan pengangguran (Amar, Astuti, & Fathoni, 2024).

Pengangguran seringkali menjadi masalah pada banyak negara, salah satunya Indonesia. Jumlah pengangguran yang tinggi di Indonesia adalah masalah yang kompleks dan mengakar. Maka dari itu, pengangguran ini merupakan permasalahan yang perlu diselesaikan dalam perekonomian Indonesia. Apabila tingkat pengangguran meningkat maka penduduk kehilangan pendapatan, yang biasanya pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, seperti kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok. Tingginya tingkat pengangguran dapat berakibat yang merugikan dan hal ini harus segera diatasi. Karena individu, masyarakat, dan juga pemerintah akan merasakan dampak dari tingkat pengangguran yang tinggi tersebut. Dampak bagi individu dan masyarakat apabila tingkat pengangguran meningkat yaitu ketidakmampuan untuk meningkatkan

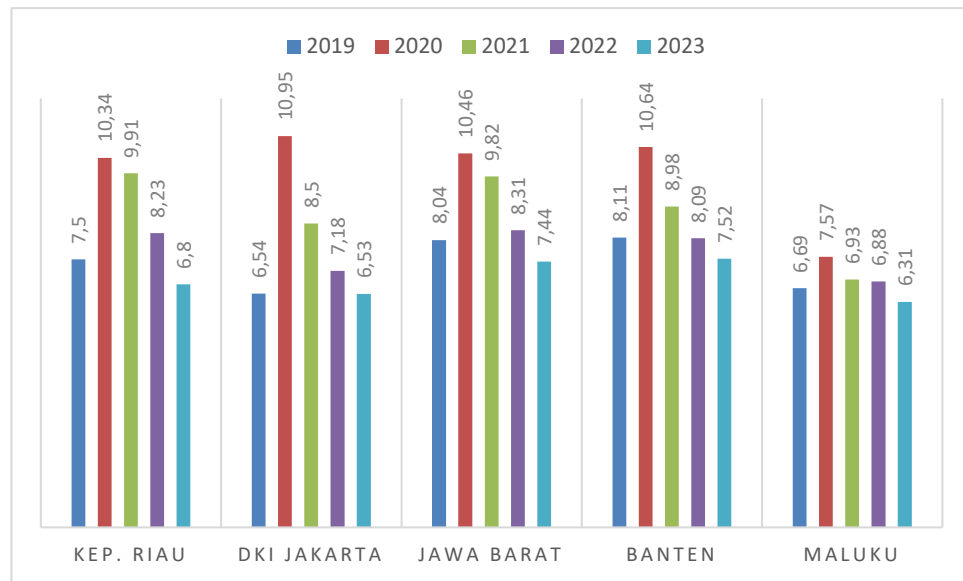
kesejahteraan seseorang, kehilangan pekerjaan dan kehilangan pendapatan, serta kehilangan keterampilan pada diri sendiri. Hal yang menyebabkan terjadinya peningkatan pengangguran disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja atau keterbatasan lapangan pekerjaan (Putra & Hidayah, 2023).

Tingkat pengangguran adalah salah satu indikator yang penting untuk melihat apakah perekonomian di suatu wilayah atau negara sedang berkembang atau tidak. Berdasarkan tingkat pengangguran, ditunjukkan untuk menentukan apakah ekonomi suatu negara atau wilayah tersebut tumbuh, stagnan atau menurun (Fajri & Iriani, 2022).

Selain itu, tingkat pengangguran juga menunjukkan seberapa baik kinerja ketenagakerjaan pada suatu wilayah. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap total jumlah penduduk. Hal ini memberikan informasi penting tentang daya serap tenaga kerja mempengaruhi kesejahteraan pada masyarakat. Di Indonesia tingkat pengangguran semakin meningkat, dikarenakan dalam penanganan masalah tersebut pemerintah dituntut untuk lebih tanggap dalam menyelesaikan masalah ini. Selain itu, pengangguran juga suatu masalah ketenagakerjaan yang serius di berbagai provinsi. Salah satunya terjadi di daerah Jawa Barat (Ishak, 2018).

Pada provinsi Jawa Barat masalah ketenagakerjaan yaitu pengangguran, merupakan masalah yang kompleks yang harus diteliti karena permasalahan pengangguran ini, memiliki keterkaitan dengan beberapa indikator seperti jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan upah minimum. Secara umum pengangguran di Jawa Barat merupakan hal yang perlu diperhatikan dan penting untuk dijadikan

target penyelesaian karena tinggi rendahnya tingkat pengangguran sangat mempengaruhi keadaan perekonomian di suatu negara. Selain itu, pengangguran juga bisa mengurangi laju garis kemiskinan. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kasanah, Hanim, & Suswandi, 2018).

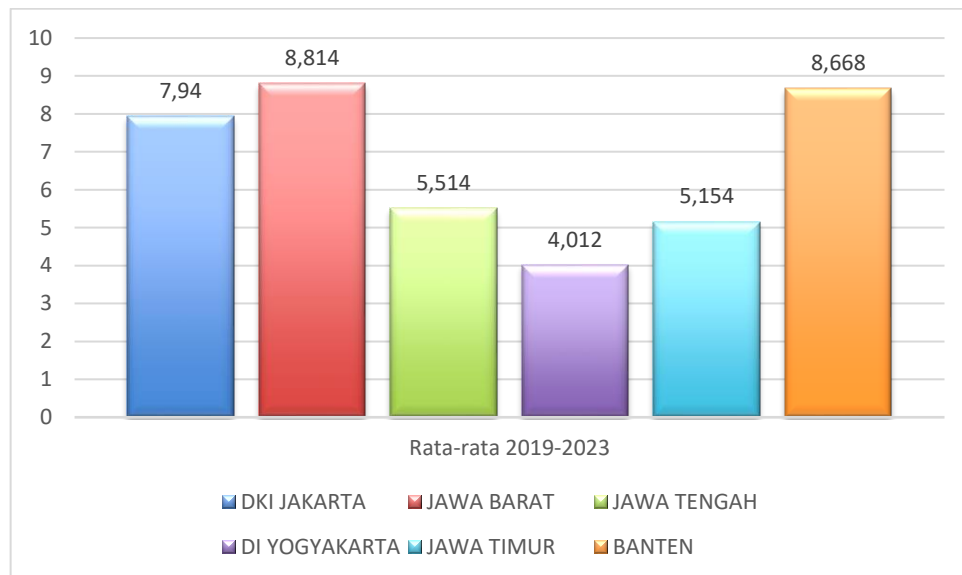


Gambar 1.1 Lima Provinsi Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi di Indonesia Tahun 2019-2023

Berdasarkan angka pengangguran di Indonesia memperlihatkan pada tahun 2019-2023 persentase tingkat pengangguran relatif masih tinggi. Pada tahun 2019-2020 memperlihatkan angka pengangguran mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan adanya covid-19 yang mengakibatkan pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka mulai turun perlahan hingga pada tahun 2023. Namun tingkat pengangguran dari kelima provinsi tersebut masih tergolong tinggi pada tingkat nasional.

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa lima tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia telah mengalami perubahan selama lima tahun terakhir. Pada beberapa

provinsi, masalah pengangguran masih menjadi masalah utama. Pengangguran akan menjadi masalah di negara-negara dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi dan masalah ini harus segera ditangani dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran.



Gambar 1.2 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Gambar 1.2 di atas menunjukkan persentase besaran tingkat pengangguran terbuka di enam provinsi yang berada di Pulau Jawa dari tahun 2019-2023. Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat pengangguran tertinggi dari enam Provinsi di Pulau Jawa dengan nilai rata-rata 8,8 persen, Provinsi Banten berada di posisi kedua dengan rata-rata 8,6 persen, Provinsi DKI Jakarta berada di posisi ketiga dengan rata-rata 7,9 persen, Provinsi Jawa Tengah berada di posisi ke-empat dengan rata-rata 5,5 persen. Provinsi Jawa Timur berada di posisi kelima dengan rata-rata 5,1 persen. Kemudian diposisi paling terakhir atau ke-enam DI Yogyakarta memiliki tingkat pengangguran terendah dengan rata-rata 4 persen.

Provinsi Jawa Barat secara konsisten berada pada peringkat kedua tertinggi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Pada tahun 2022 Jawa Barat menduduki peringkat pertama tertinggi di Indonesia (Ramadhani & Ananda, 2024). Jawa barat adalah salah satu wilayah provinsi terletak di Pulau Jawa yang memegang peranan penting dalam penerimaan tenaga kerja. Tetapi daya saing tenaga kerja menjadi akibat penyebab tingkat pengangguran masih terbilang tinggi di Jawa Barat. Hal ini dikarenakan kompetensi tenaga kerja asal Jawa Barat masih kalah dengan pendatang dari luar. Sehingga memberikan opsi lebih besar kepada Perusahaan untuk memilih berdasarkan kemampuan atau kualitas pencari kerja. Hal ini Sebagian besar disebabkan karena sistem Pendidikan yang kurang memadai pada wilayah ini, sehingga menghambat upaya guna meningkatkan mutu sumber daya manusia.

Pengangguran dapat terjadi karena peningkatan jumlah Angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Jumlah penduduk bisa dianggap sebagai salah satu faktor pendukung dalam penyerapan tenaga kerja. Pada saat jumlah penduduk meningkat maka jumlah tenaga kerja juga ikut meningkat sehingga produksi bisa naik dan pasar menjadi lebih luas. Sedangkan di sisi lain meningkatnya jumlah penduduk juga juga bisa menjadi faktor penghambat. Karena pengangguran dapat terjadi jika jumlah orang yang mencari kerja lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lowongan yang tersedia (Sukirno, 2016)

Menurut BPS (2023) Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk yang paling besar di Indonesia. Pada Desember 2023, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat mencapai 49,9 ribu jiwa atau 17,78% dari total penduduk Indonesia.

Hal ini disebabkan karena banyaknya pusat-pusat industri. Selain itu migrasi juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di wilayah Jawa Barat. Tingkat pengangguran yang tinggi di Jawa Barat dikarenakan kurangnya kesempatan kerja, yang mengakibatkan penyerapan tenaga kerja yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Selain itu, karena Jawa Barat merupakan pusat industri, sehingga tenaga kerja dari Jawa Barat kalah dengan tenaga kerja asing yang menyebabkan tingkat pengangguran masih tinggi di provinsi Jawa Barat.

Faktor kedua yang mempengaruhi tingkat pengangguran adalah tingkat Pendidikan. Pendidikan adalah salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan tidak hanya memberikan bekal pengetahuan untuk menjalankan pekerjaan dengan baik, namun juga membantu dalam pengambilan Keputusan di lingkungan kerja. Dengan kata lain, Pendidikan bukan sekedar memberikan wawasan, tetapi juga membantu kemampuan berpikir, bertindak secara tepat yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas, menjadi landasan pengembangan diri, serta kemampuan untuk memanfaatkan semuanya itu juga merupakan dasar dari kemampuan untuk sarana dan prasarana di sekitar kita untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Semakin tinggi tingkat Pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan dan kesempatan untuk bekerja (Arifin & Firmansyah, 2017).

Pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap angka pengangguran di Jawa Barat. Era global seperti saat ini, persaingan semakin ketat dan diiringi dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir seseorang. Rata-rata

jumlah tahun yang dihabiskan di sekolah merupakan salah satu indikator kondisi Pendidikan Indonesia pada saat ini. Pada peraturan pemerintah RI No.47 Tahun 2008 tentang wajib belajar, pemerintah telah mengumumkan program wajib belajar bagi anak-anak usia sekolah dasar 7-12 tahun. Tujuannya adalah untuk memberikan Pendidikan minimal kepada warga Indonesia agar mereka bisa mencapai kemampuan diri mereka dan hidup mandiri di masyarakat atau melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini yang menimbulkan masalah baru ketika jumlah peningkatan lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah lulusan (Yuliani, 2023).

Salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran yaitu ketidaksesuaian antara kemampuan pencari kerja dengan kebutuhan Perusahaan. Karena setiap pekerjaan membutuhkan kemampuan khusus di bidang tertentu. Tingkat Pendidikan sangat mempengaruhi kualitas tenaga kerja dan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung menentukan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja tersebut (Prakoso, 2021).

Pendidikan di Jawa Barat, khususnya pada rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 yaitu 8,61 yang artinya penduduk usia 15 tahun keatas di Jawa Barat rata-rata tingkat pendidikannya adalah menamatkan atau menempuh sekolah sampai ke tingkat sekolah menengah pertama (BPS 2024). Individu yang memiliki Pendidikan dasar atau menengah menyebabkan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, terutama pekerjaan yang membutuhkan keahlian dibidang khusus. Sedangkan lulusan Pendidikan tinggi lebih siap untuk menghadapi tantangan di dunia kerja karena mereka telah memperoleh Pendidikan khusus dan memiliki

pengalaman praktek yang cukup baik. Maka dari itu peningkatan kualitas Pendidikan berperan penting dalam pengurangan tingkat pengangguran.

Upah minimum juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka selain jumlah penduduk dan tingkat pendidikan. Upah adalah uang yang diterima oleh satu unit kerja sebagai kompensasi. Upah tenaga kerja sangat penting bagi kedua belah pihak. Bagi pihak produsen, upah adalah biaya produksi yang harus ditekan semaksimal mungkin. Sedangkan bagi pihak pekerja, upah adalah sumber penghasilan untuk dirinya, keluarga, serta sumber pembelanjaan masyarakat. Sebagian besar taraf hidup masyarakat dipengaruhi oleh upah yang tinggi atau rendah. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap yang ditetapkan sebagai jarring pengaman (Panjawa & Soebagiyo, 2014).

Upah yang tinggi dapat mengakibatkan pengurangan jumlah pekerja sehingga dapat meningkatkan pengangguran. Tingkat upah yang ditetapkan pemerintah di suatu wilayah akan berdampak pada tingkat pengangguran di negara tersebut. Semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan pemerintah, maka semakin sedikit orang yang bekerja pada wilayah tersebut. Maka dari itu, menurut Kaufman dan Hotckhiss, 1999 peningkatan tingkat upah yang ditetapkan akan berdampak pada peningkatan biaya output yang harus dikeluarkan oleh Perusahaan, yang berarti Perusahaan harus mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menghasilkan output yang lebih efisien. Akibatnya, tingkat upah yang lebih tinggi akan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran. (Mustaka, 2020).

Selain itu menurut (Desi, Simanjuntak, Siva, Yohen, & Angela, 2023) meningkatnya pengangguran di Indonesia karena upah yang ditawarkan Perusahaan tidak sesuai dengan harapan dari tenaga kerja. Pada Indonesia, penetapan upah minimum di setiap daerah nominalnya beragam. Tingkat pengangguran saat ini dapat dipengaruhi oleh upah minimum karena tidak semua perusahaan mampu membayar semua pekerjanya dengan upah yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Akibatnya, Perusahaan memilih untuk mengurangi jumlah pekerja agar Perusahaan dapat memenuhi peraturan upah minimum apabila upah semakin tinggi. Namun sebaliknya, apabila upah rendah Perusahaan akan menarik banyak karyawan (Dewi Indriani, 2019).

Dalam mengatasi permasalahan pengangguran, pemerintah berupaya untuk meningkatkan peluang kerja di sektor publik maupun swasta (Aulia, Malia, Pujiati, & Nihayah, 2024). Cara tersebut dapat digunakan untuk mengimbangi Angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Disnakertrans Jawa Barat (2019) telah merancang action plan untuk mengatasi pengangguran seperti revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) guna memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, baik lokal, regional, maupun internasional dan juga melakukan optimalisasi mobile training unit di desa-desa agar calon tenaga kerja yang ada di desa tidak lari ke kota. Program tersebut dilakukan dengan harapan secara berangsur-angsur angka pengangguran di Jawa Barat bisa ditekan dan menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi paling tinggi produktivitasnya. Diharapkan juga dengan adanya Langkah tersebut pemerintah Jawa Barat bisa membantu masyarakat, baik yang sudah bekerja maupun yang akan bekerja, termasuk membantu pengusaha dalam mempertahankan usahanya di Jawa Barat.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa fenomena tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat berada pada urutan ke 2 dari 38 provinsi di Indonesia dan berada pada urutan pertama di Pulau Jawa Tahun 2019-2023. Hal ini disebabkan karena penyerapan tenaga kerja yang kurang optimal dan ketersediaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jumlah pekerja, serta rendahnya kesempatan kerja. Jawa barat sendiri merupakan provinsi yang unggul pada sektor industri, pengadaan air, perdagangan, dan sektor informasi & komunikasi. Namun hal tersebut tidak membuat tingkat pengangguran di Jawa Barat mengalami penurunan.

Terdapat beberapa jenis yang mengakibatkan pengangguran di Jawa Barat tinggi diantaranya yaitu pengangguran struktural. Hal ini dapat terjadi karena tenaga kerja kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan keterampilan baru yang dibutuhkan Perusahaan yang berbeda dari sebelumnya (adanya mismatch antara skill individu dengan kebutuhan pasar tenaga kerja) seperti rendahnya tingkat pendidikan, tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, dan pergeseran kondisi pasar. Selain itu pengangguran friksional juga mengakibatkan tingginya angka pengangguran di Jawa Barat yang dikarenakan oleh fresh graduate dan individu yang mencari pekerjaan untuk pertama kali, transisi seseorang berpindah tempat tinggal, serta karyawan yang berhenti bekerja untuk mencari pekerjaan baru sehingga kesulitan dalam mencari pekerjaan dan menemukan lowongan yang sesuai dengan prosedur lamaran dan seleksi. 23,26 % penduduk pengangguran usia 15-24 tahun yang masuk kelompok fresh graduate menurut pendidikan SMP 17,85%, SMA 29,68%. SMA Kejuruan 26,91%, dan Universitas 25,51% (Bappeda, 2023).

Sehingga peningkatan angka pengangguran di Jawa Barat disebabkan karena beberapa faktor seperti adanya perkembangan teknologi, revolusi

digitalisasi, dan ketidaksesuaian keterampilan dengan minat pasar. Selain itu tingginya pengangguran di Jawa Barat juga disebabkan karena kompetensi tenaga kerja asal Jawa Barat masih kalah dengan pendatang dari luar. Sehingga memberikan perusahaan lebih banyak pilihan untuk mencari pekerja berdasarkan kemampuan dan kualitas yang mereka miliki. Oleh karena itu, tingkat pendidikan di Jawa Barat perlu ditingkatkan dan dilakukan reformasi untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Namun dengan adanya permasalahan pengangguran di Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan masyarakat setempat dapat bekerja sama untuk membuat Solusi yang inovatif dan efektif untuk menekan angka pengangguran secara optimal.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pemerintah seperti peningkatan kualitas pendidikan, pengoptimalan ketersediaan lapangan pekerjaan, dsb. Akan tetapi provinsi Jawa Barat memiliki tingkat pengangguran tertinggi kedua di Pulau Jawa dan Indonesia. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak melakukan cukup untuk mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi, yang Dimana hal tersebut dapat menciptakan ketidakstabilan sosial karena berkurangnya sumber pendapatan yang berdampak pada kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta pengangguran yang berkepanjangan dapat mendorong individu untuk melakukan Tindakan kriminal sebagai upaya untuk bertahan hidup.

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian ini karena tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah ekonomi yang menarik untuk diteliti lebih lanjut dan dari hasil penelitian tersebut dapat memberikan jawaban secara ilmiah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan penelitian

yakni **“Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Ruang Lingkup

Pengetahuan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini berasal dari analisis Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan Provinsi Jawa Barat. Fokus penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka di provinsi Jawa Barat yang memperoleh pengaruh dari jumlah penduduk, tingkat Pendidikan, upah minimum, dan tingkat partisipasi Angkatan kerja. Terdapat empat variabel independen yang digunakan dalam riset ini yaitu Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan perumusan dalam menentukan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pengangguran.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya dan Pembaca

Diharapkan temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau sumber acuan untuk memperkuat pernyataan dalam penelitian selanjutnya dengan variabel yang berlainan namun pada tema dan pembahasan yang sama.